

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBEKUAN AKSI  
CEPAT TANGGAP (ACT) KOTA PALEMBANG**



**MUHAMMAD ABDUL HALIM**

**07021281621073**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2023**

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBEKUAN AKSI  
CEPAT TANGGAP (ACT) KOTA PALEMBANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**MUHAMMAD ABDUL HALIM**

**07021281621073**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBEKUAN AKSI  
CEPAT TANGGAP (ACT) DI KOTA PALEMBANG”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh:

**MUHAMMAD ABDUL HALIM  
07021281621073**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Dr. Zulfikri Suleman, M.A.  
NIP. 195907201985031002



25/05/2023

Pembimbing II

2. Dra. Yusnaini, M.Si.  
NIP. 196405151993022001



5/07/2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT)  
Kota Palembang”**

Skripsi

Oleh :

**Muhammad Abdul Halim**  
07021281621073

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 24 Juli 2023**

Pembimbing :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA.  
NIP. 195907201985031002

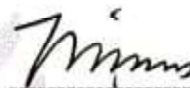
2. Dra. Yusnaini, M.Si  
NIP. 196405151993022001

Penguji :

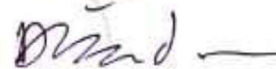
1. Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si  
NIP. 198002112003122003

2. Gita Isyanawulan, S.Sos., MA  
NIP. 198611272015042003

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

---

**PERNYATAAN ORISIONALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Halim

NIM : 07021281621073

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Di Kota Palembang” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 1 Juli 2023

at pernyataan,



Muhammad Abdul Halim  
07021281621073

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*(QS. Al-Insyirah 94 : Ayat 5-8)*

*“Bergeraklah, jangan hanya diam, kejar semua impian mu, buktikan bahwa dirimu bisa, dan yakinlah akan janji Allah SWT kepada setiap umat-Nya.”*

**Dengan Rasa Syukur atas rahmat dan nikmat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk:**

- Allah SWT
- Bangsa dan Negara
- Agama dan Almamaterku
- Ayah dan Ibu Tercinta
- Adik-adik Tersayang
- Dosen Pembimbing Skripsi Saya Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA dan Ibu Dra. Yusnaini, M.Si
- Sahabat Seperjuangan

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh. Alhamdulillah Rabbiil 'Aalamiin.* Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang”**. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga dkelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar, Aamiin ya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S-1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, untuk itu penulis tidak menutup diri terhadap kritikan dan saran yang bersifat membangun.

Penulis juga menyadari sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis berterimakasih telah diberikan bantuan, dukungan, dan juga semangat agar tetap fokus dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh kerena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah mendengar do'a dan keluh kesah dari hambanya ini yang masih banyak akan dosa selama ini, dan selalu kufur akan nikmat yang diberikan, padahal setiap nafas yang dihembuskan dalam setiap detiknya sudah merupakan nikmat untuk menjalani kehidupan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama ini.
7. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing dan membantu dalam memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing dan membantu dalam memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Sosiologi FISIP UNSRI yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas ilmu dan pengetahuan baru yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
10. Mba Yuni Yunita S.Sos selaku admin Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI, terimakasih atas bantuan administrasinya selama ini.
11. Staff dan Karyawan FISIP UNSRI terimakasih atas bantuannya selama ini dalam urusan administrasi dan yang lainnya kepada penulis.
12. Kepada para informan, terimakasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan waktu untuk melakukan wawancara sehingga data-data dan informasi yang penulis butuhkan dapat dengan mudah didapatkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
13. Terkhusus dan sangat spesial untuk kedua orang tua saya, Ayah Fred Ferdiansyah dan Ibu Endah Murtiningrum yang saya sayangi dan cintai, terimakasih atas do'a, masukan dan dukungan terhadap saya dan kasih sayang yang telah diberikan sedari kecil hingga sekarang, maaf jika selalu menyusahkan dan merepotkan ayah dan ibu. Untuk adik-adik yang saya sayangi dan cintai Yasmin Nurul Huda, Umar Abdul Rasyid, dan Dary Ihsan Amanullah, terus kejar impian dan cita-cita kalian, rajin beribadah dan



berdo'a kepada Allah SWT, selalu berbakti ke ayah dan ibu, dan buatlah kedua orang tua kita bangga, dan kelak bermanfaat bagi Nusa Bangsa dan Agama.

14. Untuk sahabat-sahabatku “Cawalaude Squad”, Maulana, Medi, Muhamad Arifin, Syarifudin Baharsah, Togi Satrio, dan Tommy Panca Nugroho terimakasih atas semua waktu, pengalaman, pembelajaran, dan perjalanan yang tidak akan pernah terlupakan.
15. Teman-teman nongkrong dan diskusi, Dimas Mahir Perkasa, Andra Nuansa Agasta, Tommy Panca Nugroho, Muhamad Arifin, Rachmatulloh, Hari Munandar terimakasih telah memberi masukan dan saran dan berbagi cerita selama ini.
16. Teman-teman dan adik-adik Organisasi BEM KM FISIP UNSRI tahun 2019/2020, terkhusus Dinas Adkesma, Andra, Rizka, Dinan, Raden, Kiani, Merli, Ica, Yuli, Gita, terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya selama di BEM.
17. Teman-Teman dan Adik-adik di HIMASOS FISIP UNSRI terimakasih atas waktu, pengalaman dan kebersamaannya.
18. Teman-teman dan Adik-adik di WAKI FISIP UNSRI (Dimas, Tommy, Arifin, Andra, Mardiyah, Maulana, Shafira, Riyadi, Togi, Kak Finzar, Kak Akbar dll) Terimakasih atas waktu, pengalaman dan silaturahmi selama ini.
19. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan FISIP UNSRI angkatan 2016 khususnya Sosiologi 2016 “TEKSOS”, yang telah menulis kisah bersama selama masa perkuliahan ini, dan juga kepada kakak tingkat dan adik tingkat.
20. Teman-teman KKN Angkatan 91 Desa Binjai, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat (Agung, Aldi, Jimmy, Desy, Eka, Purwa, Lita, Putri, Ulfa) terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya selama 40 hari kita KKN.
21. Terakhir terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan medo'akan agar penulisan

penelitian ini dapat selesai dengan tepat waktu. Maaf jika ada kesalahan penulisan nama, gelar, maupun jabatan dalam kata pengantar ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran sangat diperlukan demi kebaikan penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga amal serta kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diterima dan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Aamiin Ya Rabbal'amin.

Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatu.

Palembang, Mei 2023  
Penulis,

Muhammad Abdul Halim  
07021281621073

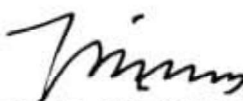
## RINGKASAN

### PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBEKUAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) KOTA PALEMBANG

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap pembekuan aksi cepat tanggap (ACT) Kota Palembang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat persepsi masyarakat dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teori persepsi dari Rahmat (2015), skema proses terjadinya persepsi dari Harisah & Masiming (2008) dan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dari Robbins (2001). Hasil penelitian ini adalah: (1) Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan adanya pembekuan terhadap ACT karena yang bermasalah hanya beberapa orang oknum saja, bukan semua pegawai dan relawan ACT terlibat. Sedangkan, masyarakat yang setuju dan menerima langkah yang diambil oleh pemerintah beranggapan bahwa hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pengelola berikutnya, baik bagi mereka sendiri yang berharap masih berjalan maupun lembaga filantropi lainnya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat berasal dari pelaku persepsi yaitu diri sendiri, target atau objek yaitu pengetahuan masyarakat mengenai objek dan situasi yaitu fakta yang terjadi serta hasil kajian-kajian/diskusi-diskusi.

**Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pembekuan, Aksi Cepat Tanggap (ACT)**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Zulfikri Suleman, MA**

**NIP. 195907201985031002**

**Dosen Pembimbing II**



**Dra. Yusnaini, M.Si**

**NIP. 196405151993022001**

**Ketua Jurusan Sosiologi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**

**NIP. 198002112003122003**

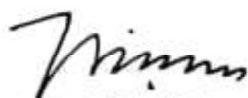
## **SUMMARY**

### **PUBLIC PERCEPTION OF THE FREEZE OF RAPID RESPONSE ACTION (ACT) PALEMBANG CITY**

*This study examines public perceptions of the freezing of rapid response action (ACT) Palembang City. The problems studied in this study are the public perception of the freeze of Aksi Cepat Tanggap and factors that influence public perception of the freeze of Aksi Cepat Tanggap. The purpose of this study is to look at public perceptions and describe the factors that influence public perceptions of the freezing of Aksi Cepat Tanggap. The research method used is descriptive qualitative with phenomenological research strategies. This study uses the theory of perception from Rahmat (2015), the process scheme of perception occurrence from Harisah & Masiming (2008), and factors that can influence public perception from Robbins (2001). The results of this study are: (1) The majority of people do not agree with the suspension of ACT because the problem is only a few people, not all ACT employees and volunteers involved. Meanwhile, people who agree and accept the steps taken by the government think that this can be a lesson for the next manager, both for themselves who hope to still run and other philanthropic institutions. (2) Factors that influence public perception come from perpetrators of perception, namely themselves, targets, or objects, namely public knowledge about objects and situations, namely facts that occur and the results of studies/discussions.*

**Keywords: Public Perception, Freezing, Rapid Response Action (ACT)**

**Advisor I**



**Dr. Zulfikri Suleman, MA**

**NIP. 195907201985031002**

**Advisor II**



**Dra. Yusnaini, M.Si**

**NIP. 196405151993022001**

**Head of Department of Sociology  
Faculty of Social and Political Science**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**

**NIP. 198002112003122003**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                              | <b>i</b>       |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                               | <b>ii</b>      |
| <b>ORISIONALITAS .....</b>                                   | <b>ii</b>      |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                            | <b>iv</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>v</b>       |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                       | <b>ix</b>      |
| <b>SUMMARY .....</b>   | <b>ix</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>xiv</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                    | <b>xv</b>      |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                                     | <b>xvi</b>     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>       |
| <b>1.1. Latar Belakang .....</b>                             | <b>1</b>       |
| <b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>                            | <b>7</b>       |
| <b>1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>              | <b>7</b>       |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian .....                               | 7              |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian .....                              | 8              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>   | <b>9</b>       |
| <b>2.1. Tinjauan Pustaka.....</b>                            | <b>9</b>       |
| <b>2.2. Kerangka Pemikiran .....</b>                         | <b>17</b>      |
| 2.2.1. Konsep Persepsi.....                                  | 17             |
| 2.2.2. Masyarakat.....                                       | 20             |
| 2.2.3. Konsep Persepsi Masyarakat .....                      | 20             |
| 2.2.4. Teori Persepsi .....                                  | 22             |
| 2.2.5. Aksi Cepat Tanggap (ACT).....                         | 26             |
| 2.2.6. Konsep Pembekuan Suatu Ormas/Lembaga Masyarakat ..... | 27             |
| <b>2.3. Bagan Kerangka Pemikiran .....</b>                   | <b>40</b>      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>3.1. Desain Penelitian.....</b>   | <b>41</b> |
| <b>3.2. Lokasi Penelitian.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>3.3. Strategi Penelitian.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>3.4. Fokus Penelitian.....</b>  | <b>43</b> |
| <b>3.5. Jenis dan Sumber Data .....</b>  | <b>44</b> |
| <b>3.6. Penentuan Informan.....</b>  | <b>44</b> |
| <b>3.7. Peranan Peneliti.....</b>  | <b>45</b> |
| <b>3.8. Unit Analisis Data .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>3.9. Teknik Pengumpulan Data .....</b>  | <b>46</b> |
| 3.9.1. Wawancara.....  | 46        |
| 3.9.2. Dokumentasi .....   | 46        |
| 3.9.3. Observasi .....   | 47        |
| <b>3.10. Teknik Analisis Data .....</b>  | <b>47</b> |
| 3.10.1. Kondensasi Data (Data Condensation).....   | 47        |
| 3.10.2. Penyajian Data (Data Display) .....  | 48        |
| 3.10.3. Kesimpulan dan Penarikan/Verifikasi ( <i>Concluding Drawing/ Verification</i> )..... | 48        |
| <b>3.11. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....</b>                                     | <b>48</b> |
| <b>3.12. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....</b>   | <b>50</b> |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>  | <b>51</b> |
| <b>4.1. Gambaran Umum Kota Palembang .....</b>   | <b>51</b> |
| 4.1.1. Letak Geografis.....  | 51        |
| 4.1.2. Kondisi Fisik Kota Palembang .....  | 53        |
| 4.1.3. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan .....  | 55        |
| 4.1.4. Kependudukan .....  | 56        |
| <b>4.2. Gambaran Umum Aksi Cepat Tanggap Kota Palembang Cabang Sumatera Selatan .....</b>    | <b>56</b> |
| 4.2.1. Sejarah Aksi Cepat Tanggap (ACT).....   | 56        |
| 4.2.2. Visi dan Misi.....  | 58        |
| 4.2.3. Struktur Manajemen ACT Cabang Palembang .....   | 58        |
| 4.2.4. Tugas dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi .....                                    | 59        |

|   |            |
|---|------------|
| 4.2.5. Program Kegiatan Aksi Cepat Tanggap .....  | 65         |
| <b>4.3. Gambaran Umum Informan .....</b>  | <b>69</b>  |
| 4.3.1. Deskripsi Informan Penelitian .....  | 69         |
| 4.3.2. Informan Penelitian.....   | 71         |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>74</b>  |
| <b>5.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT)</b>   |            |
| <b>Kota Palembang .....</b>   | <b>75</b>  |
| 5.1.1. Pengetahuan Masyarakat Tentang ACT .....   | 76         |
| 5.1.2. Pengalaman Donasi Masyarakat Terhadap ACT .....  | 79         |
| 5.1.3. Sikap dan Perilaku .....   | 82         |
| 5.1.4. Pandangan terhadap ACT setelah Isu Penggelapan Dana .....  | 87         |
| 5.1.5. Kesan terhadap ACT setelah Isu Penggelapan Dana.....   | 93         |
| 5.1.6. Persepsi Masyarakat terhadap Pembekuan ACT .....   | 99         |
| 5.1.7. Efektifitas Pembekuan ACT .....  | 105        |
| 5.1.8. Pengetahuan Informan Akan Persepsi Masyarakat Lainnya Terhadap Kasus ACT.....  | 110        |
| <b>5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang.....</b> | <b>116</b> |
| 5.2.1. Faktor Persepsi Masyarakat.....  | 116        |
| 5.2.2. Kritik, Saran atau Pesan dari Masyarakat Terhadap Pembekuan ACT  | 121        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>130</b> |
| <b>6.1. Kesimpulan.....</b>   | <b>130</b> |
| <b>6.2. Saran .....</b>   | <b>131</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>133</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>138</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1. 1 Daftar Program yang Dilakukan ACT .....  | 4   |
| Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka .....   | 14  |
| Tabel 3. 1 Perencanaan Kegiatan Penelitian .....  | 50  |
| Tabel 4. 1 Persebaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palembang .....   | 52  |
| Tabel 4. 2 Kondisi Fisik Kota Palembang .....   | 54  |
| Tabel 4. 3 Distribusi Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kota Palembang Tahun 2021 .....                  | 55  |
| Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2017 - 2021 .....   | 56  |
| Tabel 4. 5 Daftar Informan Utama .....  | 72  |
| Tabel 4. 6 Daftar Informan Pendukung.....   | 72  |
| Tabel 4. 7 Daftar Informan Kunci.....   | 73  |
| Tabel 5. 1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kota Palembang .....                          | 114 |
| Tabel 5. 2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap di Kota Palembang..... | 128 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Penerimaan dan Penyaluran Dana Kemanusiaan ACT .....              | 3  |
| Gambar 1. 2 Daftar Program yang Dilakukan ACT .....                           | 5  |
| Gambar 2. 1 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Gestalt .....            | 22 |
| Gambar 2. 2 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Teori Ecological Perception .. | 23 |
| Gambar 2. 3 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Brentano .....                 | 23 |
| Gambar 2. 4 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Brunswik's Lens Model .....    | 24 |
| Gambar 2. 5 Proses Terjadinya Persepsi Menurut Transactional Theory.....      | 25 |
| Gambar 2. 6 Skema Proses Terjadinya Persepsi.....                             | 26 |
| Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Palembang.....                             | 53 |

## DAFTAR BAGAN

|   |    |
|---|----|
| Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....  | 40 |
| Bagan 4. 1 Struktur Organisasi ACT Kota Palembang Cabang Sumatera Selatan | 59 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan bangsa. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang menjunjung demokrasi dan hukum. Dimana setiap warga negaranya berhak memiliki hukum, bebas berkemuka dan menyampaikan pendapatnya. Dengan adanya hal tersebut masyarakat bebas untuk berserikat, berpendapat, dan berdemokrasi dengan membuat organisasi, baik itu Ormas, LSM, Paguyuban, Lembaga Filantropi dan lain sebagainya.

Lembaga filantropi sendiri merupakan lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang-orang yang menerima bantuan. Bantuan tersebut bisa terdiri berupa pembinaan, bantuan alat ataupun bantuan dana dengan maksud agar kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan kelak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.

Pemerintah sendiri telah memiliki aturan tentang perizinan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan lembaga yang mengelola dana umat dan sumbangan masyarakat melalui Undang-undang, yaitu Pasal 34 UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun beberapa Lembaga Filantropi di Indonesia salah satunya adalah Aksi Cepat Tanggap.

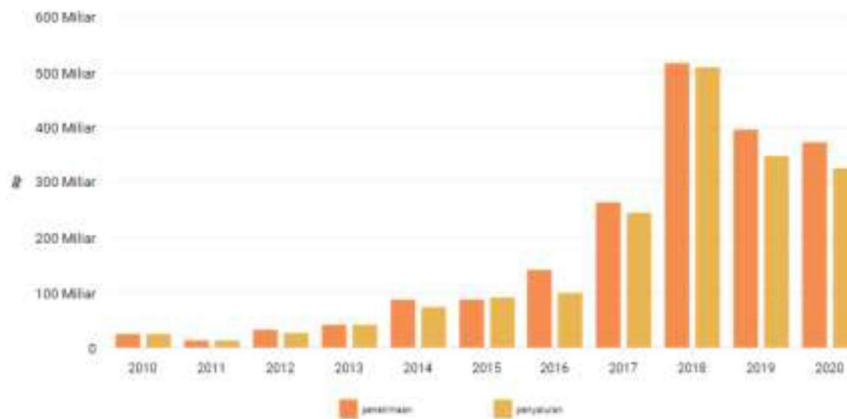
Aksi Cepat Tanggap atau yang biasa kita kenal memakai akronim ACT ialah lembaga yang berkiprah pada bidang sosial serta kemanusiaan. Aksi Cepat Tanggap (ACT) berdiri pertama kali pada 21 April 2005 yang secara hukum sebagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT memiliki kantor utama yang beroperasi di Jl. TB. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kantor Cabang Sumsel (Palembang) terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 3268, Ilir Timur 1 Palembang. ACT bisa dikategorikan menjadi *Non-Governmental Organization* (NGO) atau kalau di Indonesia kita lebih mengenalnya dengan lembaga swadaya masyarakat disingkat dengan LSM ataupun Lembaga Filantropi.

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan ACT diantaranya tanggap darurat bencana, pemulihan sesudah bencana, pengembangan serta pemberdayaan

masyarakat, dan program berlandas pada spiritual islam seperti Zakat, Qurban dan Wakaf. Lalu di tahun 2012 Aksi Cepat Tanggap (ACT) menaikkan diri menjadi sebuah lembaga kemanusiaan dunia (global), lewat ruang lingkup kegiatan yang lebih luas. Dengan adanya jaringan relawan berupa Organisasi kerelawanan yaitu, MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) yang hampir ada di semua provinsi di Indonesia, dan lebih dari 100 kabupaten/kota. Terlebih lagi pada skala dunia atau global, ACT sampai mengembangkan jaringannya dengan membuat beberapa kantor cabang ACT di luar negeri dengan tujuan agar mempermudah pemberian bantuan dari para donatur ke berbagai tempat terjadinya bencana alam, konflik dan lain sebagainya, salah satunya yaitu kantor cabang di Gaza, Palestina.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merintis kiprahnya di dalam negeri mulai tahun 2004 lebih tepatnya pada saat terjadinya bencana Tsunami melanda Aceh. Peristiwa Tsunami di Aceh sebagai asal mula dari aksinya yang kemudian melahirkan aksi-aksi kemanusiaan lainnya pada beberapa insiden bencana yang terjadi di Indonesia berikutnya, diantaranya gempa bumi di Yogyakarta (2006), Erupsi Gunung Merapi (2006), dan lain-lain.

Sebagaimana lembaga yang berkiprah pada aksi sosial dan kemanusiaan, ACT mempunyai visi “Menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik”. Dengan Visi tersebut ACT akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk turut andil dalam program-program kemanusiaan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga kemanusiaan, ACT akan bertindak secara profesional dengan tidak membedakan latar belakang korban, meski itu korban konflik ataupun korban bencana alam. Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mendapatkan banyak dukungan dari beberapa donatur umum yakni elemen masyarakat yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam melihat persoalan kemanusiaan dan juga memiliki donatur khusus yakni dukungan perusahaan lewat program kemitraan mereka.



**Gambar 1. 1 Penerimaan dan Penyaluran Dana Kemanusiaan ACT**

Berapa waktu lalu tepatnya Minggu (3/7) ramai dibicarakan di jagat media sosial Twitter mengenai Tagar #JanganPercayaACT. Dalam laporan bertajuk *Kantong Bocor Dana Umat* (2/7/2022), Majalah *Tempo* mengungkapkan bahwa para petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga melakukan penggelapan dana sumbangan masyarakat. Menurut *Tempo*, terdapat petinggi ACT yang diduga menyalahgunakan dana organisasi itu untuk kepentingan pribadinya, mulai dari membeli rumah dan perabotan, sampai mentransfer uang puluhan miliar ke keluarganya. *Tempo* juga mengatakan ada petinggi ACT yang menghadiahi diri sendiri dengan gaji fantastis hingga Rp 250 juta dan beragam fasilitas mewah lainnya seperti kendaraan mewah yakni Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport sampai Honda CRV. Tidak hanya itu, para petinggi ACT juga diklaim mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari dengan standar restoran. Padahal, sejak didirikan pada 2005, ACT secara rutin menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. ACT juga mengatakan organisasinya secara konsisten mendapat evaluasi yang baik. "Selama 14 tahun berturut-turut, kantor akuntan telah memberikan penghargaan tertinggi dalam proses audit keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Aksi Cepat Tanggap," tulis ACT dalam laman resminya. Jika melihat laporan keuangannya, nilai dana kemanusiaan yang dikelola ACT meningkat pesat selama satu dekade terakhir. Di tahun 2010 total penerimaan dana kemanusiaan ACT lebih kurang Rp25 miliar. Lalu selama periode 2016 hingga 2020 nilainya meroket sampai ratusan miliar rupiah per tahun. Terdapat perbedaan tahunan antara penerimaan serta penyaluran dana kemanusiaan ACT senilai belasan juta hingga miliaran rupiah, seperti terlihat pada grafik. Bila

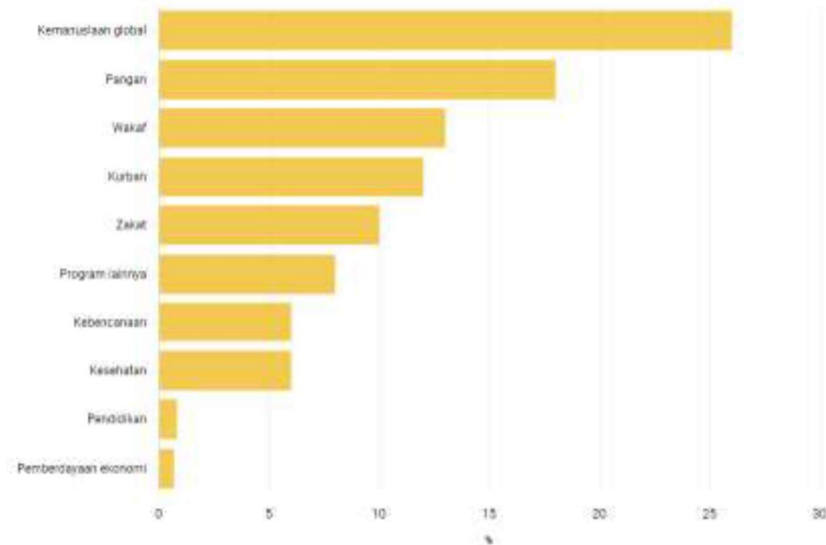
diakumulasikan, sepanjang periode 2010-2020, total selisih itu mencapai surplus Rp 180 miliar. Sementara itu, total nilai aset ACT pada akhir tahun 2020 berjumlah kurang lebih Rp 289 miliar yang terdiri atas aset jangka pendek sebesar Rp 184 miliar dan aset jangka panjang sebesar Rp 105 miliar. Sedangkan laporan keuangan ACT tahun 2021 hingga kini belum dirilis.

Pimpinan ACT yakni Ahyudin diberitakan sempat meminta untuk mengirimkan dana berjumlah Rp 11 miliar ke adiknya, Rosman. Dana tersebut sebenarnya dikumpulkan dari sejumlah donatur untuk pembangunan Masjid Dermawan dan kawasan Pesantren Peradaban tahap kedua di Desa Cintabodas, kecamatan Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat, kampung halaman Ahyudin. Belakangan transfer tersebut urung dilakukan.

Ahyudin membantah telah menyelewengkan dana lembaganya itu. “Kalau saya tidak punya uang, boleh dong saya pinjam ke lembaga,” ujarnya dalam wawancara dengan Majalah Tempo. “Saat ini saya terlilit cicilan rumah, cicilan mobil, bahkan biaya sekolah anak. Jika saya membawa kabur duit lembaga dari mana logikanya?” Dia juga menyatakan dipaksa untuk mundur dari ACT, dan dia bahkan berani untuk menghadapi masalah ini melalui jalur hukum.

**Tabel 1. 1 Daftar Program yang Dilakukan ACT**

| No | Program ACT          | Penggunaan Dana |
|----|----------------------|-----------------|
| 1  | Kemanusiaan Global   | 26%             |
| 2  | Pangan               | 18%             |
| 3  | Wakaf                | 13%             |
| 4  | Kurban               | 12%             |
| 5  | Zakat                | 10%             |
| 6  | Program Lainnya      | 8%              |
| 7  | Kebencanaan          | 6%              |
| 8  | Kesehatan            | 6%              |
| 9  | Pendidikan           | 0,8%            |
| 10 | Pemberdayaan Ekonomi | 0,7%            |



**Gambar 1. 2 Daftar Program yang Dilakukan ACT**

Kementerian Sosial (Kemensos) sudah resmi mencabut izin pengumpulan uang serta barang (PUB) yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Keputusan pencabutan izin itu diambil karena potongan uang donasi melebihi dari ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sementara itu, berdasarkan hasil klarifikasi, Presiden ACT Ibnu Khajar menjelaskan bahwa rata-rata memakai 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari donatur sebagai sumber dana kegiatan yayasan. "Angka 13,7% itu tidak sesuai dengan batasan maksimal 10%. Sedangkan PUB Bencana disalurkan sepenuhnya untuk masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang dikumpulkan," tutur Plt Menteri Sosial Muhadjir Effendy seperti dikutip *Kompas*, Rabu (6/7/2022). Dalam laporan tahunannya, ACT menjelaskan telah menggalang donasi Rp519,35 miliar pada 2020. Donasi itu didistribusikan melalui beberapa program ACT. Tertera, setidaknya ada 10 program ACT di tahun 2020. Bantuan yang disalurkan ACT Sebagian besar digunakan untuk program kemanusiaan global, tepatnya sebesar 26%. Selanjutnya, program pangan ACT sebesar 18%. Kemudian disusul program wakaf 13% dan kurban 12%. Selain itu, anggaran ACT disalurkan untuk program zakat sebesar 10%, program lain sebesar 8%, untuk bencana dan kesehatan masing-masing 6%. Terakhir, anggaran ACT disalurkan untuk program pendidikan 0,8%

dan pemberdayaan ekonomi 0,7%. Sementara itu, ACT akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dugaan penggelapan dana sosial. Berawal dari pemberitahuan *Majalah Tempo* edisi 2 Juli 2022 bertajuk *Kantong Bocor Dana Umat*. Laporan tersebut mengungkapkan dugaan penggunaan dana yayasan untuk keuntungan pribadi. Pengurus ACT juga disebut mendapatkan gaji hingga Rp 250 juta, lengkap dengan fasilitas mewah.

Lembaga amal Aksi Cepat Tanggap yang merupakan lembaga yang berfokus pada badan amal dan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dari 2018 hingga 2020, lembaga ini disebut-sebut sudah menggalang dana publik sebesar Rp 500 miliar. Sebaliknya, lembaga lain seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat hanya mengumpulkan Rp 375 miliar dan Rp 224 miliar.

Lalu, seperti disebutkan di atas Kementerian Sosial mencabut izin ACT, dengan alasan adanya bukti penyalahgunaan dana oleh ACT. Dimana Kementerian Sosial (Kemensos) RI secara resmi telah mencabut kewenangan untuk penyelenggaraan pengumpulan uang serta barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal itu tertulis di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, Selasa (5/7/2022).

Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan telah diatur dalam peraturan pemerintah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan".

Sementara itu, Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan, rata-rata 13,7 persen dari dana yang dihimpun masyarakat digunakan untuk mendanai kegiatan Yayasan ACT. Angka tersebut tidak dengan PP Nomor 29 diatas yang hanya 10 Persen. Di sisi lain, PUB bencana tersebut sepenuhnya didistribusikan ke kalangan masyarakat, tanpa adanya pemotongan biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Meski izin ACT telah dicabut oleh Kemensos RI, pihak ACT menegaskan akan tetap beroperasi untuk mendistribusikan semua bantuan kepada masyarakat



yang telah diamanahkan oleh para donatur, mitra maupun perorangan kepada ACT. Disisi lain, ACT juga akan tetap kooperatif dan mentaati semua proses hukum dan izin pencabutan penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sehingga semua kegiatan penggalangan dana dan barang oleh ACT akan dihentikan.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti memandang bahwa ACT selama ini dicitrakan sebagai lembaga yang baik dimata masyarakat umum. Namun, semenjak isu miring menerpa beberapa pimpinan mereka, pada akhirnya membuat persepsi masyarakat menjadi berubah, mengingat bahwa selama ini ACT sebagai lembaga yang amanah dalam hal baik mengelola, memberi bantuan, dan selalu transparansi dalam laporan keuangan mereka. Tentu, hal ini mengundang banyak reaksi yang beragam dari masyarakat. Terlihat dari mencuat nya dijagat sosial media terutama media sosial Twitter sampai bahkan menjadi topik yang panas bahkan sampai diangkat isunya hampir kesemua media, baik itu media massa, maupun media online.

Melihat permasalahan yang sudah peneliti jelaskan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang.

2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap.
  - b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembekuan Aksi Cepat Tanggap.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama mata kuliah Psikologi Sosial, Pengantar Antropologi dan Gerakan Sosial tentang bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Palembang. Serta diharapkan penelitian ini bisa menjadi perbandingan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pembekuan Aksi Cepat Tanggap Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badudu-Zain. (2004). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D., & Baum, A. (2001). *Environmental Psychology*. Harcourt college publishers. New York (EEUU).
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely Jr, J. H. (1989). *Organisasi dan Manajemen Perilaku: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prehallindo
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip (2004). *Marketing Management, The Millenium Edition*. Englewood. Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Lang, Jon. (1987). *Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono. (2006). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, B. & Maharani, E.V. (2012). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rakhmat, Jalaludin. (2015). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.

- Robbins, Stephen P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid. 1, Edisi 8. Jakarta: Prenhallindo.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Slameto. (2015). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Cetakan. Keenam. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman, dkk. (2010). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia.
- Walgito, Bimo. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. Deddy Mulyana.
- Winayanti, Nia Kania. (2011). *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Apustaka Yustisia.
- Yuswalina dan Budianto, Kun. (2016). *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press.

#### **Sumber dari Jurnal:**

- Agustin, A., & Khuzaini, K. (2017). *Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) di Surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(9).
- Harisah, A., & Masiming, Z. (2008). *Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol dan Spasial*. *SMARTek*, 6(1).
- Hermanto, H., Meiyani, E., & Risfaisal, R. (2019). *Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang AP Pettarani Di Kota Makassar*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 198-205.
- Herwin, H., Kaharuddin, K., & Ismail, L. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Yatim di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 173-178.
- Hidayatulloh, I., Putri, R., Ter Naotru, R., & Fedryansyah, M. (2018). *Persepsi perkawinan usia dini dan pemberdayaan gender*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(1).
- Holl, S., Pallasmaa, J., & Gómez, A. P. (2006). *Questions of perception: phenomenology of architecture*. William K Stout Pub.

- Husni, A., Rianto, R., & Dwidhika, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(1), 103-109.
- Ilham, L., & Farid, A. (2019). Kebahagiaan dalam Perspektif Masyarakat Marjinal (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(2), 95-124.
- Imaduddin, M. F. (2020). Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 3(2), 92-113.
- Imam, K., & Ahmad, M. R. S. (2019). Persepsi Perokok Aktif Dalam Menanggapi Label Bahaya Rokok Dikalangan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 51-56.
- Lestari, M. D., & Arifin, Z. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(2), 53-64.
- Mahmud, N. S., & Syukur, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Komunitas Armada Pustaka di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(1), 87-96.
- Nuhung, M. (2019). Dinamika Masyarakat Dan Budaya Dalam Pendidikan Islam. *Ash-Shahabah*, 5(1), 101-107.
- Ruswan, A., Suhaedah, S., & Nurunnahar, I. (2021). Analisis Perilaku Berbicara Kasar Siswa Sekolah Dasar dengan Pendekatan Fenomenologi. In *Renjana Pendidikan: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (Vol. 2, No. 1, pp. 597-607).
- Susanti, S., Setyowati, E., & Nanik, R. (2013). Persepsi Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya terhadap Perilaku Seks Bebas dikalangan Pelajar Surabaya. *IPI*, 3(1), 2.
- Tiga, M. R. M., Putri, E. I. K., & Ekayani, M. (2019). Persepsi masyarakat Desa Katikuwai dan Desa Praing Kareha terhadap pengembangan ekowisata di

Taman Nasional Matalawa NTT. *Jurnal Sosiologi Pedesaan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(1), 34-40.

### **Sumber Internet dan Lainnya:**

ACT Digugat Jaksa ke PN Jaksel, Diduga Masih Galang Dana-Investasi (detik.com) diakses pada tanggal 14 September 2022, Pukul 14.45

Adrianto, Bowo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Tesis. Semarang: Pasca Sarjana PWK UNDIP.

Ibrahim, M. Najib. (2011). *Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*. Tesis: Universitas Indonesia.

Ibrahim, Rustam. (2011). *Beberapa Pokok Pikiran untuk Penyusunan RUU tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. dalam diskusi di Biro Polhukam dan Kesra Sekretariat Jenderal DPR-RI, 8 Februari 2011.

Ini Temuan Majalah Tempo dan Tanggapan ACT Soal Isu Penyelewengan Dana Donasi Hingga Konflik di Internal - Nasional Tempo.co diakses pada tanggal 14 September 2022, Pukul 14.45

Izin ACT Dicabut Kemensos karena Langgar Aturan Penggunaan Dana - Tribunjateng.com (tribunnews.com) diakses pada tanggal 17 September 2022, Pukul 15.30

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. (2011). Badan Legislasi DPR RI.

Pasal 34 UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 6 ayat (1).

Soemitro, Rochmat. (1965). *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*. Disertasi: Universitas Pajajaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985.

UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.